

**SINERGITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(Studi Pada Kabupaten Rembang)**

Muhammad Tahwin

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 'YPPI' Rembang
E-mail: tahwinm@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to analyze the synergy of regional development work plan with regional medium, term development plan in Rembang Regency. The analysis method used in this study is qualitative descriptive analysis method. The result of the study shows that the percentage of regional development work plan wich synergies with regional medium term development plan is 16%. There are two priority programs in rembang regency in 2009 that do not synergize with regional medium term development plan in 2006-2010.

Keywords: regional development work plan, regional medium term development plan

PENDAHULUAN

Perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus mendapat perhatian yang serius. Hal ini karena dalam penyelenggaraan pembangunan, perencanaan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Sesuai dengan asas kesatuan wilayah, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari perencanaan pembangunan nasional sehingga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka yang meliputi (Rozali Abdullah, 2005):

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, disingkat RPJP Daerah, untuk jangka waktu dua puluh tahun.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, disingkat RPJM Daerah, untuk jangka waktu lima tahun.
- c. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kerja kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disingkat RKPD, merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu satu tahun.
- e. RPJ Daerah dan RPJM Daerah ditetapkan dengan Perda berpedoman kepada peraturan pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Rembang,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2006-2010 disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasar uraian tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis sejauh mana sinergitas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam RKPD memuat pagu indikatif dari SKPD sebagai pembiayaan program-program pembangunan. Pembahasan difokuskan pada RPJMD tahun 2006-2010 dan RKPD tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis data dalam penelitian digunakan metode analisis diskriptif kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2006 - 2010.

Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Rembang tahun 2006 – 2010 berdasar kondisi daerah, yang mencakup: PDRB, kondisi di bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan umum, prasarana dan kondisi di bidang keuangan.

Prioritas Pembangunan

Adapun kebijakan prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010 adalah sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1
Prioritas Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan
1.	Meningkatnya Kinerja Sistem Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan iklim investasi dan dunia usaha 2) Pemberdayaan UKM dan Koperasi 3) Pemanfaatan peluang sinergi industri antar daerah 4) Pembangunan kawasan industri berorientasi antar pulau dan ekspor 5) Pengembangan klaster industri 6) Peningkata kinerja BUMD 2. Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan <ol style="list-style-type: none"> 1) Revitalisasi pertanian 2) Pembangunan kawasan agropolitan 3) Pembangunan dan pengembangan agrobisnis 4) Pengembangan KSP Rembang-Blora (Banglor) 5) Pengembangan budidaya dan pengolahan peternakan 6) Pengembangan <i>corporate farming</i> 7) Pembangunan pertanian melalui pola kemitraan 3. Bidang Perikanan dan Kelautan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan KBT dan BBS 2) Pembangunan Unit Bisnis Perikanan Terpadu (UBPT) 3) Pengembangan klaster industri perikanan 4) Pengembangan budidaya perikanan 5) Pengembangan pola dan teknologi penangkapan 4. Bidang Energi <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan cakupan layanan listrik 2) Eksploitasi dan eksplorasi sumber energi alternatif 5. Bidang Konstruksi <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan infrastruktur dasar publik 2) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman.

2	Optimalnya Pemanfaatan Potensi Lingkungan (Ekosistem)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pertambangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Eksplorasi dan eksploitasi potensi tambang golongan C 2) Pembangunan kawasan industri pertambangan 3) Penggalangan kerjasama investasi industri pertambangan 2. Bidang Lingkungan Hidup <ol style="list-style-type: none"> 1) Konservasi lahan di area bekas pertambangan 2) Konservasi kawasan pesisir 3) Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) 4) Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) 5) Pelestarian fungsi lingkungan hidup 6) Pembangunan dan Pengembangan sumur resapan 3. Bidang Sumber Daya Air <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi 2) Pembangunan dan pemeliharaan waduk dan embung 3) Realiasi pembangunan Program Pengembangan Sungai Terpadu (PPST) 4) Eksplorasi sumber-sumber air
3	Meningkatnya kualitas sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> 1) Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) 2) Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) 3) Penurunan angka kesakitan beberapa penyakit menular 4) Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) 5) Peningkatan jumlah prasarana kesehatan 6) Peningkatan jumlah dan spesialisasi dokter serta paramedis 7) Peningkatan status gizi yang ditandai dengan menurunnya prevalensi gizi buruk 8) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin 9) Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSU 2. Bidang Pariwisata dan Budaya <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kunjungan wisata 2) Pengembangan sarana/prasarana wisata 3) Pengembangan paket-paket wisata antara daerah 3. Bidang Agama <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan 2) Peningkatan sarana peribadatan 3) Kerukunan umat beragama dan antar umat beragama. 4. Bidang Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Angka Transisi (AT), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) 2) Pengembangan sarana/prasarana pendidikan 3) Penyediaan sarana pendidikan kejuruan sesuai potensi lokal 4) Peningkatan peran dan fungsi tenaga guru dalam hubungannya dengan efisiensi penggunaan gedung sekolah dasar 5) Pemberian akses/kemudahan bagi keluarga miskin untuk wajib belajar 9 tahun, beserta optimalisasi pengawasannya. 6) Peningkatan kesejahteraan guru madin
4	Meningkatnya Pelayanan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pelayanan Umum <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kualitas aparat pemerintah daerah 2) Peningkatan kerjasama antar daerah (regionalisasi) 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik 2. Bidang Ketentraman dan Ketertiban <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas • Penegakan Hukum • Pengamanan dan Perlindungan masyarakat 3. Bidang Perlindungan Sosial <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan gender • Rehabilitasi dan penyediaan sarana serta prasarana akibat bencana alam. • Penanggulangan dan penanganan pasca bencana alam • Partisipasi sosial masyarakat • Peningkatan ketrampilan tenaga kerja • Perluasan Lapangan Kerja • Perlindungan anak dan Peningkatan kesejahteraan anak.

Sumber: RPJMD Kab. Rembang 2006 – 2010.

Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2009

RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2009 dimaksudkan sebagai tahapan atau komponen dalam mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang yang pada tahun 2009 memasuki tahun ke-4, dengan tujuan penyusunan adalah:

1. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Rembang tahun ke empat ke dalam rencana program kegiatan prioritas Kabupaten Rembang tahun 2009.
2. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan dan antar tingkat pemerintah.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya nasional dan daerah dalam rangka pembangunan daerah.

Sasaran penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2009 adalah:

1. Terlaksananya RPJMD Kabupaten Rembang tahun ke empat ke dalam rencana program kegiatan prioritas Kabupaten Rembang tahun 2009.
2. Terciptanya sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan dan antar tingkat pemerintahan.
3. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya nasional dan daerah dalam rangka pembangunan daerah.

Selain itu RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2009 berfungsi sebagai pedoman bagi:

1. Penyusunan RAPBD Kabupaten Rembang Tahun 2009 yang didahului dengan penyusunan KUA serta PPA yang berdasar pada Permendagri No. 59 Tahun 2007
2. Penyusunan Renja SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah tahun 2009

Prioritas Pembangunan Tahun 2009

Prioritas pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2009 adalah:

1. Kesenambungan Empat Pilar Pembangunan Daerah

a. Program penyediaan serta peningkatan infrastruktur layanan publik:

- 1) Memperlancar arus distribusi barang, jasa dan penumpang dalam melakukan kegiatan ekonomi.
- 2) Penyediaan infrastruktur kawasan strategis.

Program ini meliputi bidang jalan, jembatan, sumber daya air dan perumahan dan permukiman.

b. Program sekolah gratis dan bermutu pada jenjang pendidikan dasar.

Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan bagi masyarakat dan tuntas wajib belajar 9 tahun. Program *regrouping* SD untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya pendidikan. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk memberikan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan.

c. Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS)

Pemerintah Kabupaten Rembang memprioritaskan peningkatan derajat kesehatan melalui penanaman perilaku hidup, makan dan lingkungan sehat dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan melalui Program Jaminan Kesehatan Rembang.

d. Program Pengembangan Ekonomi Rembang

Untuk itu pengembangan ekonomi Rembang ditempuh dengan beberapa langkah pembangunan yaitu:

- 1) Pengembangan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya.
 - 2) Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi.
 - 3) Pembangunan industri sektor pertanian dan sektor produktif lainnya untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
2. Pengembangan Kawasan Prioritas
- Implementasi pengembangan kawasan prioritas tahun 2009 yang akan dikembangkan adalah:
- 1) Pengembangan Kawasan Bahari terpadu (KBT)
 - 2) Pengembangan Pelabuhan Niaga dan Kawasan Industri Kabupaten Rembang.
 - 3) Pengembangan Kawasan Bonang Binangun Sluke (BBS) Zona I dan II.
 - 4) Pengembangan Kawasan sentra produksi pertanian dan peternakan.
 - 5) Pengembangan kawasan Karang Sari Park.
3. Pengembangan Kawasan Perdesaan
- Implementasi prioritas masing-masing bidang pembangunan daerah pada desa-desa yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Rembang sehingga diperlukan strategi pengembangan kawasan perdesaan yang berbasis pada potensi unggulan lokal dalam rangka menciptakan klaster-klaster ekonomi yang saling berkait dalam kegiatan perekonomian wilayah.

Kebijakan Anggaran

1. Kebijakan pendapatan

Meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan usaha BUMD dan Kelompok Ekonomi Produktif, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan potensial, peningkatan dana perimbangan

serta agresif dan selektif dalam menangkap peluang investasi daerah.

2. Kebijakan belanja Daerah

- a. Pembiayaan urusan wajib dan pilihan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan dengan pengelolaan yang transparan, berbasis kinerja, efisien, efektif dan akuntabel.
- b. Bantuan keuangan, diarahkan sebagai salah satu upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah melalui bantuan umum dan bantuan khusus antara lain Alokasi Dana Desa (ADD) dan pagu kecamatan.
- c. Bantuan hibah untuk instansi vertikal diberikan secara selektif untuk menjamin terciptanya penyelenggaraan pembangunan pemerintahan yang lebih kondusif di Kabupaten Rembang.
- d. Belanja Bantuan Sosial, diarahkan pada sasaran secara selektif, tidak terus-menerus, tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah.
- e. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Untuk melihat sejauh mana program kegiatan prioritas Kabupaten Rembang tahun 2009 sebagai penjabaran dan sinergitasnya terhadap RPJM Daerah Kabupaten Rembang tahun 2006-2010, maka dilakukan dengan membandingkan antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2009 terhadap

Prioritas Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana pada Tabel 2. Kabupaten Rembang tahun 2006 – 2010

Tabel 2.
Sinergitas Program Prioritas RKPD Tahun 2009 dengan
Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rembang

No	Prioritas Dalam RPJMD	Prioritas Dalam RKPD 2009
1	Pengadaan infrastruktur dasar publik	Program Penyediaan dan peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik
2	Pemberian akses/kemudahan bagi keluarga miskin untuk wajib belajar 9 tahun, beserta optimalisasi pengawasannya	Program sekolah gratis pada jenjang pendidikan dasar
3	Pengembangan sarana/prasarana pendidikan	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
4	Peningkatan peran dan fungsi tenaga guru dalam hubungannya dengan efisiensi penggunaan gedung sekolah dasar	Program <i>regrouping</i> SD
5	1) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin 2) Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSU	Program Jaminan kesehatan Rembang Sehat (JKRS)
6	Peningkatan kinerja BUMD	Pengembangan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya
7	1) Peningkatan iklim investasi dan dunia usaha 2) Pemberdayaan UKM dan Koperasi	Program baik melalui bantuan modal usaha kepada kelompok-kelompok usaha maupun peningkatan ketrampilan ekonomi masyarakat
8	1) Pembangunan kawasan industri berorientasi antar pulau dan ekspor 2) Pembangunan dan Pengembangan Agrobisnis 3) Pengembangan Budidaya dan pengolahan peternakan 4) Pembangunan pertanian melalui pola kemitraan 5) Pembangunan Unit Bisnis Perikanan Terpadu (UBPT)	Pembangunan industri sektor pertanian dan sektor produktif
9	Pengembangan KBT dan BBS	1) Pengembangan Kawasan Bahari terpadu (KBT) 2) Pengembangan Kawasan Bonang Binangun Sluke (BBS) Zona I dan II.
	Pengembangan klaster industri perikanan 1) Pengembangan klaster industri pertanian	Pengembangan Kawasan sentra produksi pertanian dan peternakan

Sumber: RPJMD Kab. Rembang 2006 – 2010, RKPD Kab. Rembang 2009

Berdasar pada Tabel 2 terlihat bahwa Kabupaten Rembang tahun 2006 – 2010 program kegiatan prioritas Kabupaten Rembang terdapat 68 program. Sehingga secara tahun 2009 yang sinergi dengan RPJMD presentase program yang ada dalam RKPD Kabupaten Rembang sebanyak 11 program yang sinergi dengan program yang ada dalam kegiatan yang merupakan penjabaran dari RPJMD sebesar 16 persen. Kalau dilihat RPJMD Kabupaten Rembang. Sedangkan secara persentase sangat kecil sekali, Prioritas Pembangunan Jangka Menengah tetapi yang perlu diingat adalah bahwa pada

tahun 2009 adalah merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMD.

Sedangkan program kegiatan prioritas Kabupaten Rembang tahun 2009 yang tidak sinergi dengan RPJM Daerah Kabupaten Rembang tahun 2006-2010, terdapat dua program yaitu:

1. Pengembangan Pelabuhan Niaga dan Kawasan Industri Kabupaten Rembang
2. Pengembangan kawasan perdesaan yang berbasis pada potensi unggulan lokal

Adapun mengenai kebijakan umum yang dilakukan dalam RKPD tahun 2009 dan kebijakan umum dalam RPJMD adalah sebagaimana pada Tabel 3.

Tabel 3
Kebijakan Umum RKPDP tahun 2009 dan Kebijakan umum dalam RPJMD

RPJMD	RKPD
1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan serta kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.	1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan dan mandiri.
2. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat sekitar kawasan dengan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestariannya.	2. Peningkatan investasi daerah yang mampu menyerap tenaga kerja dalam rangka pengurangan tingkat pengangguran.
3. Meningkatkan mutu, dan produktivitas komoditas.	3. Pengembangan kawasan perdesaan melalui pengelolaan potensi unggulan lokal dan penguatan kelembagaan.
4. Menciptakan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan daerah serta meningkatkan pendapatan masyarakat.	4. Pembangunan infrastruktur pengembangan ekonomi wilayah.
5. Mendorong dan mempercepat pengembangan wilayah dalam mencapai kemajuan.	

Sumber: RPJMD Kab. Rembang 2006 – 2010, RKPDP Kab. Rembang 2009

Dari Tabel 3 terlihat bahwa terdapat satu kebijakan umum dalam RKPDP tahun 2009 yang kurang sinergi dengan kebijakan umum dalam RPJMD yaitu tentang peningkatan efisiensi dan

efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan dan mandiri. Adapun rencana Pendapatan Kabupaten Rembang Tahun 2009 adalah sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Rembang Tahun 2009

No	Uraian	2008	Proyeksi 2009
1	PENDAPATAN DAERAH	576.004.241.000	579.791.628.000
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47.342.347.000	51.129.734.000
	Hasil Pajak Daerah	6.115.000.000	6.604.200.000
	Hasil Retribusi Daerah	29.710.714.000	32.087.710.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.161.040.000	6.653.923.000
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	5.335.593.000	5.784.040.000
1.2	DANA PERIMBANGAN	497.738.763.000	497.738.763.000
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	48.257.063.000	48.257.063.000
	Dana Alokasi Umum	398.410.700.000	398.410.700.000
	Dana Alokasi Khusus	51.071.000.000	51.071.000.000

1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.923.131.000	30.923.131.000
	Hibah	0	0
	Dana Darurat	0	0
	Dana bagi hasil pajak, retribusi daerah dan bagi hasil lainnya dari provinsi dan pemerintah lainnya.	17.410.362.000	17.410.362.000
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0
	Bantuan Keuangan dari propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.	13.512.769.000	13.512.769.000

Sumber: RKPD Kab. Rembang 2009

Dengan rencana pendapatan sebesar Rp. 579.791.628.000,- seperti yang tercantum pada tabel 4 maka kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyusun pagu indikatif SKPD, harus dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan membatasi usulan dengan urgensi yang paling tinggi. Untuk menghitung *sharing pagu indikatif*

anggaran tiap SKPD dalam membiayai belanja harus tetap berdasar pada pendekatan penganggaran berbasis kinerja, yakni mendasarkan pada faktor-faktor determinan anggaran SKPD sesuai tujuan pembangunan (Renstra) SKPD Kabupaten Rembang. Adapun pagu indikatif SKPD tahun 2009 sebagai berikut pada Tabel 5.

Tabel 5
Pagu Indikatif SKPD Tahun 2009

No	SKPD	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN	185.182.984.000	41.700.000.000	226.882.984.000
2	DINAS KESEHATAN	18.441.716.000	24.800.000.000	43.241.716.000
3	RSUD	10.537.032.000	14.200.000.000	24.737.032.000
4	DPU	4.427.316.000	49.500.000.000	53.927.316.000
5	BAPPEDA	1.400.508.000	4.600.000.000	6.000.508.000
6	DINAS PERHUBUNGAN	2.227.536.000	2.300.000.000	4.527.536.000
7	KKP	2.709.514.000	3.200.000.000	5.909.514.000
8	KANTOR CAPIL DAN KEPENDUDUKAN	601.503.000	1.400.000.000	2.001.503.000
9	BKBPM	4.085.108.000	3.600.000.000	7.685.108.000
10	DISKESOSNAKERTRANS	2.529.835.000	1.900.000.000	4.429.835.000
11	DISPERINDAGKOP	1.914.862.000	2.500.000.000	4.414.862.000
12	KESBANG LINMAS	923.420.000	1.400.000.000	2.323.420.000
13	SATPOL PP	835.004.000	2.400.000.000	3.235.004.000
14	DPRD	6.807.423.000	-	6.807.423.000
15	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	616.563.000	-	616.563.000
16	SEKRETARIAT DAERAH	69.039.259.000	-	69.039.259.000
	Bagian Keuangan		225.000.000	225.000.000
	Bagian Organisasi		467.000.000	467.000.000
	Bagian Kekayaan Daerah		894.000.000	894.000.000
	Bagian Kepegawaian		665.000.000	665.000.000
	Bagian Umum		9.500.000.000	9.500.000.000

	Bagian Infokom		750.000.000	750.000.000
	Bagian Pemerintahan		1.600.000.000	1.600.000.000
	Bagian Hukum		696.000.000	696.000.000
	Bagian Perekonomian		700.000.000	700.000.000
	Bagian Pengendalian Program		469.000.000	469.000.000
17	SEKRETARIAT DEWAN	1.552.802.000	7.600.000.000	9.152.802.000
18	DISPENLOPAS	6.148.177.000	3.200.000.000	9.348.177.000
19	BAWASDA	1.375.238.000	840.000.000	2.215.238.000
20	Kecamatan Rembang	1.588.939.000	361.000.000	1.949.939.000
21	Kecamata Kaliori	540.346.000	218.000.000	758.346.000
22	Kecamatan Sulang	965.476.000	199.000.000	1.164.476.000
23	Kecamata Sumber	350.469.000	186.000.000	536.469.000
24	Kecamatan Bulu	726.564.000	177.000.000	903.564.000
25	Kecamata Lasem	687.317.000	249.000.000	936.317.000
26	Kecamatan Pancur	545.025.000	208.000.000	753.025.000
27	Kecamata Sluke	336.509.000	161.000.000	497.509.000
28	Kecamatan Pamotan	786.029.000	212.000.000	998.029.000
29	Kecamata Gunem	541.663.000	182.000.000	723.663.000
30	Kecamatan Sale	613.487.000	181.000.000	794.487.000
31	Kecamata Kragan	605.580.000	227.000.000	832.580.000
32	Kecamatan Sedan	445.991.000	205.000.000	650.991.000
33	Kecamata Sarang	582.979.000	204.000.000	786.979.000
34	BKD	1.435.656.000	2.150.000.000	3.585.656.000
35	KANTOR PARSIP DAN PDE	1.208.520.000	1.200.000.000	2.408.520.000
36	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	3.993.296.000	6.500.000.000	10.493.296.000
37	DINAS KEHUTANAN	2.940.614.000	1.500.000.000	4.440.614.000
38	DISTAMBEN DAN LH	1.114.612.000	3.000.000.000	4.144.612.000
39	DIPARSENIBUD	1.480.960.000	1.600.000.000	3.080.960.000
40	DISKANLUT	1.998.421.000	5.000.000.000	6.998.421.000
	JUMLAH	344.874.253.000	205.026.000.000	549.900.253.000

Sumber: RKPD Kab. Rembang 2009

Dengan melihat pada Tabel 5 terlihat bahwa total anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Tidak Langsung (belanja aparatur negara) sebesar Rp. 344.874.253.000 adalah jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan Belanja Langsung (pelayanan publik) Rp. 205.026.000.000.

Hal tersebut diatas perlu dicermati karena berdasar pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam

pengelolaan keuangan daerah. Yang mana dalam paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*publik oriented*). Sehingga seharusnya dengan anggaran yang berbasis kinerja, belanja terbesar adalah untuk kepentingan masyarakat yaitu pelayanan publik.

Selain itu karena dalam penyusunan RKPD tahun 2009 adalah tahap keempat atau tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2006-2010 maka harus diperhatikan juga faktor-faktor determinan anggaran belanja SKPD

yang sesuai dengan tujuan pembangunan (Renstra) yaitu:

1. *Stakeholders perception index* (SPI), yang menunjukkan urutan prioritas anggaran SKPD berdasarkan kriteria kontribusi masing-masing SKPD terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang direpresentasikan oleh indeks-indeks pembangunan yang didasarkan pada empat pilar program pembangunan daerah.
2. Menunjukkan kapasitas dan peranan SKPD dalam pembangunan berdasarkan determinasi anggaran belanja tahun sebelumnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Secara presentase program-program yang ada dalam RKPD yang sinergi dengan program yang ada dalam RPJMD sebesar 16 persen.
2. Program kegiatan prioritas Kabupaten Rembang tahun 2009 yang tidak sinergi dengan RPJM Daerah Kabupaten Rembang tahun 2006-2010, sebanyak dua program kegiatan.
3. Untuk kebijakan umum dalam RKPD tahun 2009 yang kurang sinergi dengan kebijakan umum dalam RPJMD adalah tentang peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan dan mandiri.

Saran

1. Dalam proses penyusunan RKPD sampai dengan alokasi anggaran masing-masing SKPD harus tetap mengakomodasi usulan masyarakat.

2. Dalam menghitung *sharing pagu indikatif* anggaran tiap SKPD untuk membiayai belanja harus tetap berdasar pada pendekatan penganggaran berbasis kinerja.
3. Dalam penyusunan RKPD tahun 2009 harus diperhatikan juga faktor-faktor determinan anggaran belanja SKPD yang sesuai dengan tujuan pembangunan (Renstra)

DAFTAR PUSTAKA

- Davey, KJ. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, penerjemah Amanulah, dkk. Jakarta. UI Press.
- Devas. Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Penerjemah Masri Maris. Jakarta. UI Press.
- Mudrajat Kuncoro. 2003. *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah dan Kebijakan)*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Pemerintah Kabupaten Rembang. 2008. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009*.
- *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2006 – 2010*.
- *Perda Kabupaten Rembang No.1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2006 – 2010*.
- Pemerintah Republik Indonesia *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan otonomi Luas dan Pemilihan Kepala daerah Langsung*.